



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI ROMIYANI
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 71876

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

4.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/124 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/123 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2228 m2/120 m2 di NGANJUK, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 986 m2 di LUMAJANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/60 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

355.500.000

1. MOTOR, SANEX SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

72.305.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

351.222.139



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.479.027.139
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.479.027.139

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.